

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian desa adalah kondisi di mana desa memiliki kapasitas untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Kemampuan masyarakat untuk Menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunana sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi lokal disebut kemandirian desa. Desa yang mandiri atau desa sembada adalah desa yang telah berkembang dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataanya mencapai tingkat otonomi ini seringkali menghadapi sejumlah tantangan termasuk keterbatasan sumber daya alam dan manusia, kelemahan Lembaga desa, serta pengelolaan potensi ekonomi wilayah yang kurang memadai. Kemandirian desa dalam kerangka otonomi daerah memerlukan kesiapan dari Lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi ditingkat desa, oleh karena itu meningkatkan peran dan kegiatan Lembaga desa sangatlah penting dari sudut pandang strategis. desa mandiri atau disebut sebagai desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan(Puspayanthi et al., 2017).

Kemandirian desa dapat terwujud apabila ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang didasari pada komitmen Bersama untuk mengakiri pola ketergantungan pada pemerintah pusat, dapat membantu sebuah desa menjadi mandiri. Kemandirian desa mencakup hubungan kerjasama antara unsur masyarakat desa adat dengan unsur masyarakat desa secara administratif untuk memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan perubahan terhadap ketergantungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada serta memanfaatkan potensi desa(Hayati et al., 2022) . Hal ini dicapai dengan memanfaatkan potensi lokal dan

memberdayakan sumberdaya manusia yang tersedia. menurut definisinya, desa adalah suatu komunitas yang mampu mengelola urusanya sendiri. Desa memiliki otonomi sejati berada dalam posisi yang sangat strategis karena mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan terkait berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan variable sosiokultural setempat. Karena otonomi desa yang kokoh akan berdampak besar terhadap pencapaian otonomi daerah secara keseluruhan, maka peklaksanaan otonomi daerah harus mendapatkan perhatian yang sepadan.

Untuk memastikan kesejahteraan yang merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan desa. Kemandirian desa dianggap memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa-desa yang, mandiri diperlukan inisiatif inovatif, komitmen yang kuat, serta konsistensi dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dirancang secara strategis dan terukur. Untuk itu, kemandirian desa perlu didukung oleh kegiatan yang bersifat kreatif, komitmen tinggi, dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan, yang direncanakan secara strategis dan terukur(Mizwar Hasyim, 2019) .Dalam konteks ini, program desa hebat yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten ponorogo sangat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup yang tinggi. Program ini merupakan upaya sistematis untuk mendorong kemandirian desa dibidang kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membekali masyarakat di wilayah ponorogo dengan perangkat yang mereka butuhkan untuk mengelola sumber daya dan potensi mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah kabupaten, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan angka stunting serta angka kematian ibu dan anak, memperbaiki pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan, memperkuat ekonomi dan infrastruktyur desa, serta menciptakan desa yang mandiri Tangguh merupakan tujuan dari program ini.

Desa dapat dikatakan hebat apabila berhasil memenuhi sejumlah persyaratan penting yang mencerminkan baik standart hidup maupun kemandirian warganya sehingga desa tersebut dapat dikategorikan sebagai desa teladan.

Persyaratan tersebut meliputi perekonomian lokal yang kokoh yang dapat meningkatkan kesejahteraan, tingkat Kesehatan masyarakat dan Pendidikan yang baik sebagai landasan pembangunan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Indikator yang sama pentingnya meliputi pelestarian budaya dan lingkungan, penerapan tata Kelola yang transparan dan bersih, ketahanan pangan yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dan berbagai jenis inovasinya. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya (Agustina & Sembiring, 2018).

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan terobosan politik baru dalam relasi negara-desa. Peraturan ini yang sering diebut sebagai (pemerintahan berbasis masyarakat) menempatkan desa sebagai tingkat pemerintahan terdepan dan landasan peradapan bangsa. Desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi urusan masyarakat dan pemerintahan, baik yang bersifat otonom maupun tradisional. Untuk mendukung pembagnunan ekonomi desa dan penyediaan layanan sosial dasar berdasarkan potensi lokal, seperti sumber dasya alam, sumber daya manusia, dan nilai-nilai budaya tradisional. Undang-undagn ini juga menerapkan satu desa satu rencana dan satu sistem anggaran yang diatur dalam pasal 78 dan 82 yang mengadopsi pola swakelola anggaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo mengumpulkan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan program ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.3/ARH/420/405.26/2025 tentang pelaksanaan program desa hebat tahun 2025 dan untuk mendukung program ini sesuai rencana pembangunan jangka Panjang kabupaten ponorogo strategi komunikasi kepemimpinan pemnerintah kabupaten ponorogo dan arah strategis pembangunan daerah dimasa depan keduanya didasari pada akronim (HEBAT) yang merupakan singkatan dari harmonis, indah, dinamis, terpercaya, dan taat

agama yang dilekatkan pada visi–misi pembangunan dan berbagai program desa maupun kepemudaan.

Mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam proses pembangunan perdesaan adalah penting untuk menjadikannya tolak ukur mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, Desa-desa pada tingkat pemerintahan terendah ditargetkan mampu memanfaatkan keseluruhan instrumen tersebut secara cermat, dalam wujud kegiatan dan usaha yang produktif (Junarto & Salim, 2022). Program desa hebat diluncurkan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan standar hidup yang tinggi. Program ini memandirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif, memberikan pelatihan, serta meningkatkan Kerjasama antar desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana program pelaksanaan program ini oleh pemerintah kabupaten ponorogo mendukung kemandirian lokal.

Konsekuensi Ponorogo Hebat adalah 281 desa yang ada harus hebat-hebat. Bupati Sugiri Sancoko mematok syarat bahwa program pembangunan desa di Ponorogo harus selaras dengan program sejumlah kementerian sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Indeks-indeks yang hendak dicapai tidak jauh berbeda. Misalnya terkait ketahanan pangan, reboisasi atau penghijauan, penanganan stunting, dan pertumbuhan ekonomi yang detail menyentuh UMKM sampai BUMDes. Jika program-program yang ada itu menjadi pergerakan serentak, maka akan tiba suatu masa kondisi desa yang hebat di seluruh Ponorogo.

Pemkab Ponorogo pun sengaja memberikan atensi ketat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) agar pembiayaan kegiatan selaras dengan program prioritas daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Ponorogo, Agus Sugiarto mengatakan Desa Hebat di Ponorogo bukan hanya menonjol di satu aspek. Melainkan menjalankan secara bersamaan

program-program prioritas Pemkab Ponorogo dan Pemerintah Pusat secara efektif.

Ada Sembilan indikator ideal dalam konsep Desa Hebat. Yakni, tata Kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sehat dan berpendidikan, ketahanan pangan, budaya dan pariwisata, lingkungan hidup, infrastruktur yang memadai, ekonomi, transformasi digital dan inovasi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator-indikator ini lah yang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap desa agar mampu menjadikan desa tersebut mandiri secara sepenuhnya.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat mengutamakan ketahanan pangan yang merupakan salah satu indikator utama kemakmuran masyarakat. Hal ini sejalan dengan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan diwilayah Ponorogo melalui pembentukan badan ketahanan pangan daerah Kabupaten Ponorogo. ketersediaan pasokan yang melimpah, aspek kuantitas dan kualitas, serta jaminan keamanan pangan untuk konsumsi semuanya tercakup dalam kebijakan pangan yang telah ditetapkan. Pemerintah secara aktif berupaya kemciptakan ketahanan pangan yang kokoh, tangguh, dan berkelanjutan. Konsep Desa Hebat dalam konteks ketahanan pangan sebagai indikator untuk membantu masyarakat desa menjadi lebih mandiri dalam hal ketersediaan pangan dan stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sedang melaksanakan operasi serentak diwilayah Ponorogo. Selain itu Langkah ini juga merupakan tujuan dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan swasembada pangan guna menyoongkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa diwajibkan mengembangkan pertanian dan peternakan yang mendukung ketahanan pangan. Diharapkan Kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor-sektor terkait lainnya akan meningkatkan dan memperkuat sektor pangan diwilayah Ponorogo.

Pengembangan ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang penting dalam konteks pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki potensi yang besar dalam hal ketahanan pangan yang berkelanjutan karena didukung oleh sumber daya alam yang

melimpah, kearifan lokal, dan struktur sosial masyarakat yang kuat. Melalui sektor pertanian dan peternakan yang secara terencana dan berkelanjutan, ketahanan pangan tidak hanya berfungsi untuk menjamin ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan, tetapi juga mampu memperdayakan masyarakat desa supaya mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat ekonomi lokal. Desa Klepu yang terletak di Kecamatan Sooko merupakan salah satu desa yang memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Desa ini didukung oleh lahan pertanian yang produktif, sumber daya manusia yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari perwujudan program desa hebat yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Program ketahanan pangan di Desa Klepu merujuk pada peraturan menteri desa Nomor 2 tahun 2024 atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang menyatakan penggunaan dana sebesar 20%. Hal ini menegaskan komitmen Desa Klepu untuk meningkatkan dan memaksimalkan produk-produk ketahanan pangan agar dapat menjamin ketersediaan pasokan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian Desa Klepu berusaha menjamin ketersediaan pangan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang terkait dengan penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat desa antara lain meliputi pelestarian sumber daya alam dan lahan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan semata, tetapi juga diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti menjaga kesuburan tanah, ketersediaan air, serta keanekaragaman hayati lokal, dan kerukunan umat beragama turut berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial, sehingga mendukung keberlangsungan program ketahanan pangan secara kolektif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa menunjukkan antusiasme dan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Partisipasi ini menjadi landasan yang kuat bagi kerja sama masyarakat dalam melaksanakan program desa (Amalia P et al., 2025).

Dalam implementasi penguatan ketahanan pangan perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam sektor pertanian dan pangan, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun peran kelembagaan desa seperti BUMdes. Program ketahanan pangan diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat serta menjamin ketersediaan dan akses pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian upaya ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Desa Klepu

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERWUJUDAN PROGRAM DESA HEBAT DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi program ketahanan pangan dalam mendukung perwujudan program desa hebat di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implemementasi program ketahanan pangan dalam mendukung perwujudan program desa hebat di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan partisipatif dalam konteks otonomi daerah. Temuan-temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi penerapan program ketahanan pangan dan pembangunan desa kabupaten ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membantu pemerintah Desa Klepu dengan berfungsi sebagai alat penilaian dan sumber informasi untuk penyusunan strategi ketahanan pangan lanjutan dari program desa hebat. Oleh karena itu diharapkan program ini akan lebih berhasil mendorong kemandirian lokal dan juga sebagai panduan untuk memaksimalkan keterlibatan aktif warga dan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan langsung dalam mempromosikan keberlanjutan inisiatif pembangunan desa dikalangan pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini mengacu pada cara rencana, kebijakan, atau program yang dilaksanakan. Implementasi menurut definisinya adalah penggunaan taktik dan alokasi sumber daya, istilah ini diambil dari Bahasa Inggris yang mengacu pada Tindakan melakukan sesuatu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan implementasi sebagai upaya nyata untuk menerapkan informasi dan fakta guna mewujudkan konsep, gagasan dan kebijakan. Implementasi menggambarkan Tindakan yang mengikuti rencana yang telah berhasil dilaksanakan.

2. Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Secara konseptual, ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu sistem pangan, baik pada tingkat individu, rumah tangga, komunitas, negara, maupun global, untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan yang mencukupi, berkualitas, aman, bergizi, dan bervariasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dari semua individu secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang .

3. Program Desa Hebat

Desa hebat sebagai strategi utama untuk mendukung pembangunan pedesaan yang merata dan sejalan diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Program ini bertujuan untuk membangun pedesaan yang sejahtera dengan standar hidup tinggi berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan sejumlah indikator terukur yang harus dipenuhi dalam kerangka gagasan ini sebagai landasan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Desa Hebat mewajibkan seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program ini yang pada dasarnya merupakan gerakan untuk pembangunan dan transformasi.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya oleh Andi Rachman Salasa yang berjudul “Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan di Indonesia” (Jejaring administrasi publik, Vol. 13 No 1, 2021) mengajukan dengan jelas bahwa paradigma pendekatan ketersediaan pangan atau swasembada hingga saat ini masih mendominasi kebijakan ketahanan pangan nasional, definisi ketahanan pangan dari FAO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang mencakup tiga karakteristik utama yaitu ketersediaan, akses, dan keterjangkauan, menjadi landasan teori penelitian ini. Teori hak atas (entitlements) dari Amartya Sen, yang berpendapat bahwa akses distribusi yang tidak memadai merupakan penyebab utama kemiskinan dan kerawanan pangan, semakin memperkuat penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif dan analisis-kritis untuk mengevaluasi efektifitas strategi swasembada pangan, dengan menganalisis data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai kebijakan pemerintah, serta literatur kebijakan pangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terlalu berfokus pada peningkatan produksi dan pemeliharaan harga beras nasional ternyata tidak efektif maupun berhasil. Hal ini disebabkan karena pendekatan pangan rumah tangga dan regional. Oleh karena, penelitian ini menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia adalah melalui pergeseran paradigma menuju strategi multidimensi dan multilevel. Pembangunan makroekonomi, program pengetasan kemiskinan, dan perluasan akses masyarakat terhadap pangan harus dipandang sebagai instrumen pelengkap yang fleksibel, bukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan pangan nasional (Salasa, 2021).

Penelitian oleh Reni Chaereni, Dedy Agustanto, Ronal Amriza, dan Patmasari Nainggolan melakukan studi kedua berjudul "Ketahanan dan Keberlanjutan." berdasarkan kerangka kerja yang mencakup empat aspek penting yaitu, ketersediaan pangan, stabilitas, akses, dan pemanfaatan. Studi ini menggunakan metodologi campuran serta tinjauan Pustaka. Studi ini didasarkan pada konsep ketahanan pangan FAO yang menekankan akses ekonomi dan fisik terhadap pangan bagi seluruh rumah tangga. Kebijakan yang diusulkan bersifat menyeluruh dan mencakup Langkah-langkah untuk mendiversifikasikan pangan sesuai dengan potensi lokal, meningkatkan produktifitas, dan melindungi lahan pertanian, selain perubahan penekanan dari sekadar swasembada menjadi kemandirian pangan. Studi ini menemukan sejumlah hambatan penting dalam upaya Indonesia mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, seperti tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang mendorong peningkatan konsumsi pangan, berkurangnya luas lahan pertanian akibat konversi lahan untuk kepentingan non-pertanian, ketergantungan untuk impor untuk beberapa komoditas pangan strategis, serta terbatasnya penerapan teknologi pertanian akibat kurangnya transfer pengetahuan dari lembaga penelitian kepada petani. produksi lahan juga menurun akibat menurunnya kesuburan tanah, kelangkaan

pasokan air, dan kurangnya minat kaum muda untuk bekerja dibidang pertanian. Jurnal ini mengusulkan beberapa Langkah strategis untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan produktivitas melalui subsidi irigasi dan teknologi, memanfaatkan lahan kering dan lahan tidur secara optimal, mendiversifikasi produksi pangan berdasarkan sumber daya lokal, serta memperkuat peraturan perundangan-undangan yang mendukung swasembada pangan. Memperkuat sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, mengisi Kembali ketersediaan pangan komunal, dan memberikan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pada akhirnya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan memerlukan komitmen Bersama dari masyarakat dan pemerintah melalui strategi terpadu yang mencakup seluruh pasokan dari hulu hingga hilir (Chaireni et al., 2025).

Penelitian yang berjudul “Eksistensi Generasi Muda dalam Menjaga Ketahanan Pangan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi di Desa Kadungrembug, Kabupaten Sidoarjo”. Yang ditulis oleh Ana Toni Roby Candra Yudha, Salsa Yuli Setiani, Nurul Huda, Maksum, Sugiyanto. Didasarkan pada beberapa landasan teoritis, salah satunya adalah peran pemuda sebagai asset nasional dan penerus estafet pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang pemuda yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia antara 16 hingga 30 tahun. Selain itu teori pembangunan pertanian Todaro (2002) dan konsep ketahanan pangan yang menekankan ketersediaan, stabilitas, dan keterjangkauan pangan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk petani muda serta pejabat desa. Analisis dokumen dari badan pusat statistik (BPS) dan pejabat terkait Kabupaten Lamongan juga digunakan untuk memperkuat analisis ini. Menurut penelitian pertanian di Desa Kedungrembug belum mampu secara signifikan meningkatkan kehidupan petani, meskipun didukung oleh teknologi dan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah. Tingginya pupuk, kelangkaan dan kurangnya bantuan pemerintah masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi petani dan juga regenerasi dari pertanian dari generasi

muda yang masih rendah, setidaknya ada dua factor internal dan eksternal yang berperan. Masalah internal meliputi upah yang rendah, kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang industri tani, kesadaran yang minim akan nilai produk lokal, serta keyakinan bahwa Bertani tidak memiliki potensi masa depan. Lambatnya proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan, kurangnya dukungan dari orang tua yang umumnya memandang Pendidikan formal sebagai jalan keluar dari sektor pertanian, serta sistem Pendidikan yang tidak mengarahkan generasi muda untuk menekuni pertanian sebagai profesi, merupakan beberapa factor eksternal yang memengaruhi keputusan generasi muda untuk bekerja diluar desa mereka atau di sektor non-pertanian. Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat dan orang tua mendorong generasi muda untuk menjadi kreatif dan inovatif. Pemerintah juga diharapkan lebih proaktif dalam mengembangkan program-program yang menarik, seperti komunitas pertanian pemuda, bantuan teknologi dan pupuk, serta regulasi inovatif guna mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian sebagai industri modern dan menjanjikan (Berkelanjutan et al., 2023).

Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Klaten” yang ditulis oleh Wahyu Adhi Saputro dan Yuli Fidayani. Studi ini didasarkan pada konsep ketahanan pangan rumah tangga sebagaimana didefinisikan oleh porsi pengeluaran pangan atau rasio pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan desain cross sectional yang berarti bahwa data dikumpulkan hanya satu kali pada titik waktu tertentu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat bagaimana beberapa factor independent berpengaruh. Sampel terdiri dari tiga puluh rumah tangga petani dengan klinik pertanian dan program swasembada pangan dari desa jambakan dan karanglo di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga petani di wilayah tersebut menghabiskan rata-rata 54,03 % pengeluarannya untuk pangan, yang mengindikasikan bahwa mereka umumnya dianggap memiliki ketahanan pangan. Regresi linier berganda

menunjukkan bahwa hanya tiga dari tujuh variable yang diteliti memiliki pengaruh signifikan. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan, kenaikan harga beras dapat mengakibatkan penurunan ketahanan pangan dan meningkatkan porsi pengeluaran untuk makan. Pengetahuan gizi ibu rumah tangga juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa ibu dengan pengetahuan gizi yang lebih baik seringkali menangani pembelean makan secara lebih sistematis sehingga memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi rumah tangganya. Sementara itu, ditemukan bahwa empat factor tambahan jumlah tanggungan keluarga, tingkat Pendidikan ibu rumah tangga, harga minyak, dan harga tempe tidak memiliki dampak yang signifikan dalam kerangka penelitian ini. Untuk mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan, studi-studi ini menekankan pentingnya menaikkan upahpetani, mendiversifikasikan asupan makanan guna mengurangi ketergantungan pada beras, serta memberikan edukasi gizi pada ibu rumah tangga (Tangga et al., 2020).

Penelitian yang berjudul “Implementasi Hidroponik Sebagai Bentuk Pertanian Modern Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Musir Lor” Yang ditulis oleh. Hendra Maulana, Andhika Yudha Fachriza, Mohamad Fikri Azam, Widayana Dini Maylinda, Indra Rasendriya Pratama, Nirwana Septania Galih Perwira Moekti. Kegiatan ini didasari oleh teori tentang pertanian modern dan sistem hidroponik sebagai solusi inovatif mengatasi keterbatasan lahan pertanian. Hidroponik didefinisikan sebagai budidaya tanaman tanpa tanah, mengandalkan air yang kaya nutrisi, dengan keunggulan seperti efisiensi lahan, hasil yang terkontrol, dan tidak bergantung pada musim. Teori ketahanan pangan juga menjadi landasan, mengingat hidroponik dapat menyediakan pangan (khususnya sayuran) secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah pengabdian masyarakat berbasis sosialisasi dan pelatihan partisipatif. Metode pelaksanaan mencakup survei masalah, koordinasi dengan pemangku kepentingan desa (perangkat desa, PKK, Kelompok Wanita Tani), sosialisasi materi, pelatihan praktik langsung pembuatan dan perawatan hidroponik, pemberian paket teknologi, serta monitoring berkala untuk memastikan keberlanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Musir Lor pada 11 Mei 2023 dan diikuti oleh 32 peserta (terutama ibu-ibu PKK dan perwakilan warga) berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat mengenai pertanian hidroponik. Sebelumnya, warga hanya mengenal budidaya konvensional dan terkendala keterbatasan lahan untuk menanam sayuran. Sosialisasi dan pelatihan praktis mulai dari penyemaian benih pakcoy, perakitan rangka pipa hidroponik, hingga pemindahan tanaman dan pemberian nutrisi mendorong antusiasme tinggi peserta, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait biaya, peralatan, dan teknis pembuatan. Hasil monitoring selama satu bulan pasca-kegiatan menunjukkan perkembangan tanaman yang baik dan minat warga untuk mengadopsi sistem ini di pekarangan rumah masing-masing. Dampak positif yang dicapai antara lain peningkatan kesadaran akan alternatif pertanian modern, pemberian solusi atas masalah keterbatasan lahan, serta potensi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga melalui penyediaan sayuran segar yang dapat ditanam sepanjang tahun. Dengan demikian, implementasi hidroponik berperan sebagai langkah awal membangun kemandirian pangan berbasis teknologi sederhana dan ramah lingkungan di tingkat komunitas (Maulana et al., 2023).

Secara keseluruhan, gap penelitian utama yang membedakan skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dari beberapa aspek, dari aspek cakupan analisis, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi faktor-faktor ketahanan pangan atau rekomendasi kebijakan makro, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan implementasi program (perencanaan, input, proses, hingga produk) dengan menggunakan kerangka teori evaluasi kinerja program CIPP dari Daniel Stufflebeam. dari aspek pendekatan, penelitian ini menggabungkan analisis kelembagaan (peran BUMDes, Gapoktan, dan pemerintah desa) dengan analisis perilaku masyarakat, sehingga memberikan gambaran utuh tentang dinamika implementasi di lapangan. dari aspek fokus, Desa Klepu memiliki karakteristik unik sebagai desa dengan potensi pertanian yang besar namun menghadapi tantangan spesifik berupa ketiadaan jaminan pasar dan rendahnya kesadaran kolektif, yang belum

banyak dikaji dalam literatur ketahanan pangan desa di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa evaluasi implementatif program ketahanan pangan dalam kerangka Desa Hebat yang mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat secara stimultan.

G. Landasan Teori

Landasan teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Tujuan utama dari penggunaan landasan teori adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas dan sistematis bagi penelitian.

1. Evaluasi Kinerja Program

1.1 Pengertian Evaluasi Kinerja Program

Teori penelitian evaluasi kinerja program pada dasarnya adalah sebuah kerangka berpikir sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, teori ini memandu peneliti untuk memandang program sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai komponen saling berkaitan, serta bertujuan utama untuk menyediakan informasi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah berkembang beragam model evaluasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan konteks program.

Evaluasi merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan (Muryadi, 2017). Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan tes, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit

evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan suatu "judgement" apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak

2. Model Evaluasi CIPP Daniel L. Stufflebeam

Dalam penelitian implementasi program ketahanan pangan dalam perwujudan Desa Hebat ini diperlukan suatu pendekatan evaluasi yang komprehensif dan sistemik. Daniel L. Stufflebeam mengembangkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang menawarkan kerangka evaluasi program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga dampak nyata yang dihasilkan. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada akhir tahun 1960-an merupakan salah satu kerangka evaluasi program yang paling berpengaruh dan komprehensif, yang pada dasarnya menggeser paradigma evaluasi dari sekadar pembuktian pencapaian tujuan menjadi upaya sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Berlandaskan filosofi bahwa tujuan terpenting evaluasi adalah "*not to prove but to improve*", model ini menyediakan pendekatan berorientasi keputusan (*decision-oriented*) yang dirancang untuk membantu para pengelola program dalam membuat keputusan yang lebih baik di setiap fase siklus program.

Model CIPP didasarkan pada pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan sekadar membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi konteks (*context evaluation*) berfokus pada identifikasi kebutuhan, masalah, dan tujuan program, serta kesesuaian program dengan kondisi lingkungan tempat program diimplementasikan. Dalam penelitian ini, evaluasi konteks digunakan untuk menganalisis latar belakang dan kebutuhan ketahanan

pangan di Desa Klepu serta bagaimana program Desa Hebat merespons kebutuhan tersebut. Evaluasi masukan (*input evaluation*) menelaah sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta strategi yang digunakan dalam implementasi program. Evaluasi proses (*process evaluation*) bertujuan mengawasi, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan pelaksanaan program, sehingga dapat diketahui sejauh mana program ketahanan pangan dijalankan sesuai dengan rencana. Evaluasi produk (*product evaluation*) mengukur hasil dan dampak yang telah dicapai oleh program, dalam hal ini terkait dengan luasan lahan persawahan yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian ramah lingkungan serta ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan skala rumah tangga di Desa Klepu. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi program ketahanan pangan dalam perwujudan Desa Hebat, mulai dari tahap perencanaan hingga pencapaian hasil, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan bagi pengembangan program ke depan.

2.1 Context Evaluation

(*context evaluation*) merupakan tahap awal dalam model CIPP yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, peluang, aset, dan kondisi lingkungan yang menjadi dasar dalam perencanaan program ketahanan pangan di desa klepu. Evaluasi konteks berfungsi menyediakan informasi bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tujuan program yang relevan dengan kebutuhan sasaran serta kondisi organisasi dan lingkungan. Dengan demikian, evaluasi konteks tidak hanya berorientasi pada identifikasi permasalahan, tetapi juga pada analisis potensi, peluang, dan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi konteks menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara tepat (Irene, 2023).

2.2 Input Evaluation

(*input evaluation*) merupakan tahap yang bertujuan untuk menilai seluruh sumber daya, strategi, serta kemampuan organisasi yang akan digunakan dalam melaksanakan suatu program. Fokus utama evaluasi input adalah memastikan bahwa program memiliki kesiapan yang memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap evaluasi konteks. Melalui evaluasi ini, evaluator mengidentifikasi alternatif strategi terbaik, menilai kelayakan rencana kerja, mengkaji kecukupan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, kebijakan pendukung, serta prosedur pelaksanaan program sehingga dapat dipilih pendekatan yang paling efektif dan efisien. Hasil evaluasi input menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah suatu program layak dilaksanakan, perlu dimodifikasi, atau memerlukan tambahan sumber daya sebelum implementasi dilakukan (Lee et al., 2019). evaluasi input pada program ketahanan pangan di desa klepu tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi sumber daya, tetapi juga sebagai dasar dalam memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan program. Oleh karena itu, evaluasi input bersifat decision-oriented, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengambil kebijakan dalam merancang program secara lebih efektif sebelum implementasi dimulai. Dengan demikian, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kualitas hasil evaluasi input karena tahap ini memastikan bahwa seluruh komponen pendukung telah siap dan sesuai dengan kebutuhan program.

2.3 Process Evaluation

(*process evaluation*) merupakan tahap evaluasi yang berfokus pada pemantauan pelaksanaan program secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa implementasi program ketahanan pangan di desa klepu berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, standar operasional, serta tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi proses juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan, penyimpangan, dan

kebutuhan perbaikan selama program berlangsung sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sebelum program berakhir. Stufflebeam menekankan bahwa evaluasi proses tidak hanya bertujuan membuktikan keberhasilan suatu program, tetapi lebih penting lagi untuk memperbaiki (*improve*) kualitas pelaksanaan program secara berkesinambungan. Evaluasi produk tidak hanya berfokus pada hasil akhir (*outcomes*), tetapi juga mencakup dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi yang diperoleh dari evaluasi produk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti apakah program perlu dilanjutkan, dimodifikasi, diperluas, atau dihentikan. Stufflebeam menekankan bahwa evaluasi produk harus mampu menunjukkan nilai (*worth*) dan manfaat (*merit*) suatu program melalui bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Product Evaluation

Evaluasi produk (*product evaluation*) umumnya diterjemahkan menjadi beberapa ukuran yang lebih spesifik, seperti tingkat pencapaian output, tingkat kepuasan penerima manfaat, peningkatan kompetensi atau kinerja peserta, perubahan perilaku atau kondisi sasaran, kebermanfaatan hasil program, serta keberlangsungan pemanfaatan hasil program setelah implementasi berakhir. Pemilihan indikator tersebut disesuaikan dengan karakteristik program yang dievaluasi, namun tetap mengacu pada prinsip dasar evaluasi produk menurut Stufflebeam, yaitu menilai keberhasilan program berdasarkan hasil nyata yang diperoleh serta kontribusinya terhadap pemecahan masalah dan peningkatan kualitas program di masa mendatang.

3. Konsep Ketahanan Pangan

3.1 ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan secara langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat, stabilitas ekonomi, serta ketahanan suatu negara. Konsep ketahanan pangan mengalami perkembangan yang

cukup signifikan, dari yang semula hanya berorientasi pada ketersediaan pangan (*food availability*) menjadi konsep yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari kemampuan suatu negara dalam memproduksi pangan, tetapi juga dari kemampuan seluruh masyarakat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Perlindungan et al., 2024).

Secara konseptual, *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh individu, setiap saat, memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi serta preferensi pangan guna menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Definisi tersebut menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas pangan, tetapi juga memperhatikan kualitas pangan, aksesibilitas, serta keberlanjutan pemenuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan

Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan pangan telah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan

masyarakat melalui pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan.(Ariani & Suryana, 2023).

Dalam perspektif pembangunan nasional, ketahanan pangan memiliki hubungan yang erat dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan kemandirian pangan (*food self-reliance*). Kedaulatan pangan menekankan hak negara dalam menentukan kebijakan pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar internasional. Sementara itu, kemandirian pangan mengarah pada kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi domestik dengan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi, dan kelembagaan nasional. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global.

Di Indonesia, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Strategi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi, serta berbagai program pemerintah seperti pengembangan lumbung pangan masyarakat, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan pemerintah, modernisasi pertanian, dan pemberdayaan kelembagaan petani. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar tujuan pembangunan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pangan, stabilitas distribusi, daya beli, kualitas konsumsi, serta keberlanjutan sumber daya pertanian. Indonesia sebagai negara agraris masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, antara lain alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim,

pertumbuhan jumlah penduduk, rendahnya regenerasi petani, serta ketimpangan distribusi pangan antarwilayah.

Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan nasional diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, pembangunan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui kebijakan yang terintegrasi dari aspek produksi, distribusi, konsumsi, hingga keberlanjutan lingkungan.

3.2 Ketahanan Pangan Desa Hebat

Dalam konteks pembangunan desa, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Program Desa Hebat Kabupaten Ponorogo menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan desa karena sektor pangan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan hidup. Program ini tidak hanya mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Program Desa Hebat dipandang sebagai suatu sistem pembangunan desa yang mampu menciptakan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Sumber : Data Primer).

Pengukuran ketahanan pangan dalam Program Desa Hebat diwujudkan melalui dua indikator utama yang saling melengkapi. Indikator pertama adalah luas lahan sawah yang digunakan untuk budidaya pertanian ramah lingkungan atau organik. Indikator ini merepresentasikan

dimensi keberlanjutan produksi pangan karena keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan menjaga kualitas sumber daya alam sebagai faktor utama produksi pertanian. Budidaya pertanian ramah lingkungan merupakan sistem produksi yang mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis, memanfaatkan pupuk organik, pestisida hayati, serta menerapkan prinsip konservasi tanah dan air sehingga mampu mempertahankan kesuburan lahan dalam jangka panjang. Pertanian organik tidak hanya memberikan manfaat ekologis berupa peningkatan kualitas tanah, keanekaragaman hayati, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan keamanan pangan karena menghasilkan produk yang lebih sehat dan bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Oleh sebab itu, semakin luas lahan sawah yang menerapkan sistem budidaya ramah lingkungan, semakin tinggi pula kapasitas desa dalam membangun sistem produksi pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian ketahanan pangan jangka panjang.

Selain berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, indikator luas lahan budidaya ramah lingkungan juga mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya pertanian secara efektif melalui dukungan kebijakan, penyediaan sarana produksi, pendampingan kelompok tani, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengurangi daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan produksi pangan dapat terjaga dari generasi ke generasi. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur aspek kuantitatif berupa luas lahan yang dibudidayakan secara organik, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah desa dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan desa berkelanjutan.

Indikator kedua dalam konsep ketahanan pangan Program Desa Hebat adalah ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan pada skala rumah tangga. Ketersediaan pangan rumah tangga menunjukkan kemampuan setiap keluarga dalam menyediakan pangan yang cukup baik melalui hasil produksi sendiri maupun melalui mekanisme pasar. Rumah tangga dikatakan memiliki ketersediaan pangan yang baik apabila mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan sepanjang waktu tanpa mengalami kekurangan pasokan. Dalam konteks pembangunan desa, ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui optimalisasi pekarangan rumah, pengembangan pertanian keluarga, peternakan, perikanan, maupun diversifikasi komoditas pangan lokal sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari luar desa (Sumber: Data Primer)

Pada aspek akses pangan menggambarkan kemampuan rumah tangga memperoleh pangan yang tersedia, baik melalui daya beli ekonomi, kepemilikan sumber daya produksi, maupun kemudahan distribusi pangan. Akses pangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga, kesempatan kerja, harga pangan, infrastruktur distribusi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun suatu wilayah memiliki produksi pangan yang tinggi, ketahanan pangan belum dapat dikatakan tercapai apabila sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pangan akibat rendahnya daya beli atau terbatasnya akses terhadap pasar. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan kelompok masyarakat agar seluruh rumah tangga memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Sementara itu, aspek pemanfaatan pangan berkaitan dengan kemampuan rumah tangga mengonsumsi pangan yang aman, bergizi, beragam, dan seimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Pemanfaatan pangan tidak hanya dipengaruhi

oleh jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga oleh pengetahuan mengenai gizi, pola konsumsi, sanitasi lingkungan, kualitas air bersih, serta perilaku hidup sehat. Rumah tangga yang memiliki ketersediaan pangan yang cukup belum tentu memiliki ketahanan pangan yang baik apabila pangan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Oleh sebab itu, pemanfaatan pangan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas ketahanan pangan karena berhubungan langsung dengan status kesehatan, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Dalam implementasinya pada Program Desa Hebat, ketiga dimensi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman obat keluarga, peternakan skala rumah tangga, budidaya ikan air tawar, serta diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga memperluas akses terhadap pangan bergizi sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pangan rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil produksi sehingga menciptakan siklus ekonomi lokal yang lebih produktif. Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan dalam Program Desa Hebat tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, serta menciptakan sistem pangan desa yang berkelanjutan.

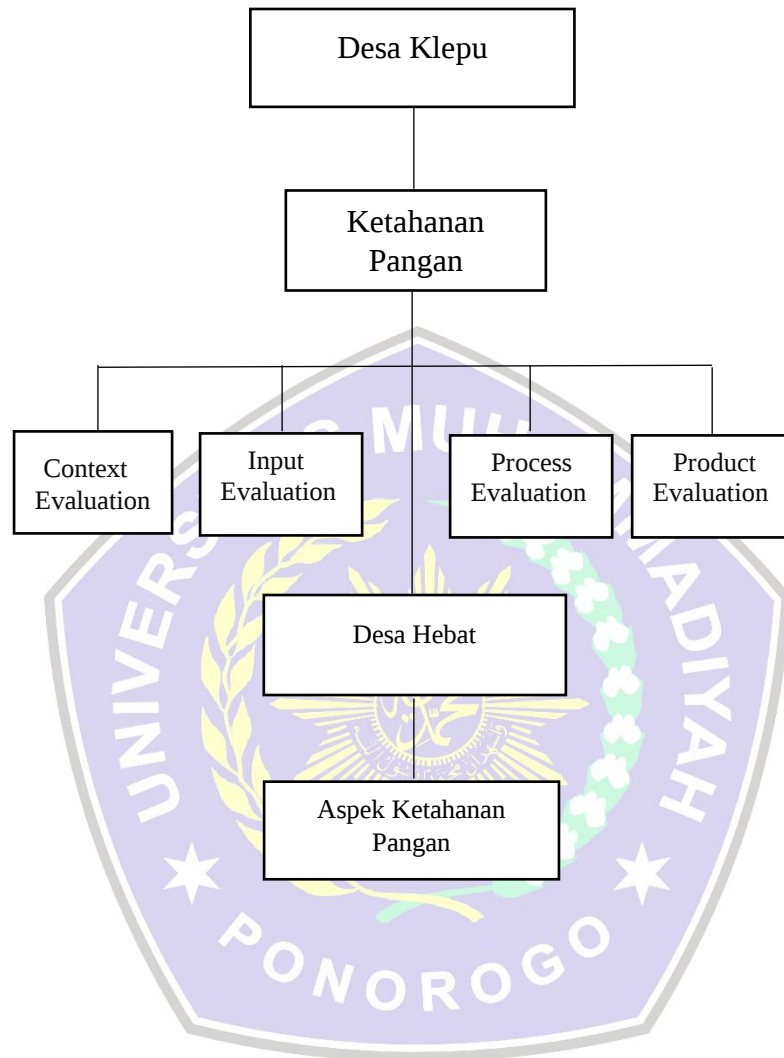
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep ketahanan pangan dalam Program Desa Hebat merupakan pendekatan pembangunan desa yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas produksi pertanian, serta penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Pengukuran melalui indikator luas lahan sawah yang digunakan untuk budidaya ramah lingkungan atau organik dan

ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan skala rumah tangga menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai keberhasilan meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi juga sebagai kemampuan desa membangun sistem pangan yang berkelanjutan, tangguh, inklusif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Desa Hebat dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berketahanan pangan.



H. Definisi Operasional

Gambar 1. 1 Bagan Definisi Operasional



- A. Context evaluation orientasi utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menilai kebutuhan, masalah yang terjadi, sumber daya yang tersedia, dan peluang yang dimiliki, guna membantu para pengambil kebijakan untuk menentukan tujuan dan skala prioritas serta hasil yang dicapai. Evaluasi konteks menentukan konteks yang relevan, mengidentifikasi populasi target, dan menilai kebutuhannya apakah tujuan proyek terhadap kebutuhan yang dinilai telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat ataupun kondisi lingkungan.
- B. Input evaluation, evaluasi ini mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu pengambil kebijakan dalam menentukan tujuan, berbagai prioritas, memilih berbagai rencana yang ada, penyesunan proposal pendanaan, alokasi berbagai sumber, serta menilai berbagai rencana aktivitas dan penganggaran. Tujuannya untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan dengan perkataan lain, evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur hamburkan sumber daya.
- C. Process evaluation, proses memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, orientasi dari evaluasi proses untuk mengidentifikasi, memprediksi kelemahan dalam prosedural atau pelaksanaannya, memberikan informasi keputusan terhadap program, perekaman, prosedur, dan aktivitasnya. Evaluasi proses berusaha mengakses pelaksanaan untuk membantu staf penyusun program dari perencanaan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat. Tujuannya adalah memberikan masukan tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Apabila rencana tersebut perlu dimodifikasi atau dikembangkan, evaluasi proses memberikan petunjuknya.
- D. Product evaluation, Evaluasi produk berkaitan dengan hasil dari sebuah program atau kumpulan gambaran dan hasil dari penilaian yang terkait

dengan tujuan, konteks, input, dan proses yang kemudian selanjutnya ditafsirkan, dinilai, dimaknai dengan jujur. Evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program untuk memperoleh keluaran dan manfaat, terencana maupun tidak, jangka pendek atau jangka panjang. Komponen ini juga membantu para pengguna yang lebih luas untuk mengukur kesuksesan dalam mencapai target yang diinginkan.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010) penelitian kualitatif merupakan metode yang dapat meningkatkan pemahaman dengan secara bersamaan meneliti fenomena yang terkait dengan pengalaman peneliti, termasuk perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Metode ini juga berupaya untuk meneliti dan menganalisis apa yang diyakini oleh orang-orang atau kelompok dalam masyarakat sebagai hasil dari masalah sosial atau kemanusiaan. Saat ini belum ada definisi yang diterima secara luas mengenai penelitian kualitatif sebagai metodologi, namun dengan meneliti banyak definisi yang diajukan oleh para ahli, definisi yang menyeluruh dan komprehensif integrative dapat dikembangkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan Program Ketahanan Pangan sebagai bagian dari implementasi Program Desa Hebat. Desa Klepu memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan potensi sumber daya pertanian dan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pangan, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana

kebijakan ketahanan pangan diimplementasikan pada tingkat desa. Selain itu, Desa Klepu juga menjadi representasi penting dalam melihat peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta mekanisme tata kelola pemerintahan desa dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berbasis kemandirian dan keberlanjutan. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik implementasi Program Ketahanan Pangan sekaligus menilai sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan tujuan Program Desa Hebat.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sengaja memilih informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program ketahanan [pangan sebagai bagian dari program desa hebat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan pertukaran tanya jawab antara peneliti dan informan, sebuah Teknik pengumpulan data yang mendalami informasi secara mendalam. Wawancara merupakan kegiatan yang mempertemukan dua individu untuk melakukan pertukaran baik informasi maupun ide melalui tanya jawab, demikian melalui hal tersebut didapatkan sebuah kesimpulan terkait topik tertentu (Irawan et al., 2024). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur yang berarti bahwa meskipun peneliti telah menyiapkan pertanyaan penting, informan masih diperbolehkan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

b. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti tanpa mengintervensi atau mempengaruhi apa yang diamati (Juwita, 2024). Data primer yang akurat tentang pola atau peristiwa sehari-hari adalah tujuannya. Pendekatan ini dibagi menjadi dua kategori yaitu, observasi non-partisipan (peneliti bertindak sebagai pengamat yang tidak memihak, misalnya melalui catatan lapangan atau rekaman) dan observasi partisipan (peneliti secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati). Manfaat utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk merekam perilaku spontan yang sulit diungkapkan ketika hanya bergantung pada survei atau wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder baik berupa file dokumen-dokumen dan kegiatan wawancara penelitian berbentuk foto dan gambar dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dengan menyimpan berbagai bentuk kegiatan melalui pengambilan gambar.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar, merupakan variabel yang ingin diukur titik salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data titik dasarnya adalah bahwa fenomena yang teliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai isu sudut pandang. Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi dari pada sikap dan jumlah orang (Mulia, 2024).

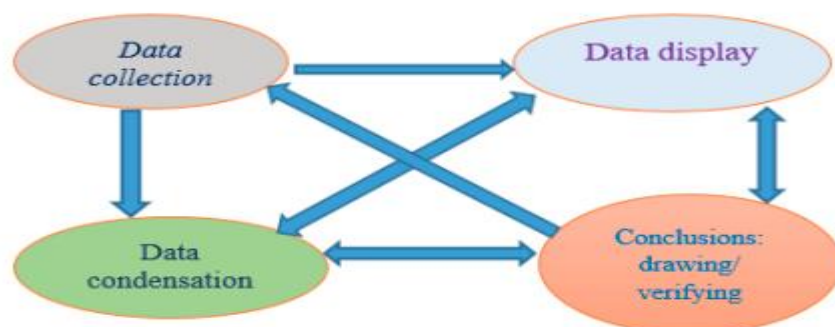
Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi, data dikumpulkan dari berbagai sumber, metode, dan perspektif teori guna memastikan informasi yang diperoleh benar-benar representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data (Nurfajriani et al., 2024). Hal ini mencakup perbandingan data dari wawancara, observasi, dan dokumen terhadap satu sama lain untuk menemukan konsistensi atau perbedaan penting.

6. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh akan lebih bermakna. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.(Dasarja, 2023). Analisis data dalam penelitian ini berkaitan dengan tema yang dibahas oleh peneliti, yaitu implementasi program ketahanan pangan dalam perwujudan program desa hebat di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Miles, Hubberman, dan saldana (2014), analisis data kualitatif dibagi menjadi empat tahapan yaitu, Pengumpulan Data (*Data Collection*) Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Display Data*), Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Gambar 1. 2 Bagan Analisa data Interaktif Menurut Miles, Hubberman, dan Saldana (2014)



a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai bentuk dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini terus dilakukan sampai peneliti benar-benar mendapatkan data semaksimal mungkin agar tercapai kesempurnaan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Miles, Hubberman, dan Saldaña (2014) mendefinisikan kondensasi data sebagai proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data dari dokumen, catatan lapangan, transkrip wawancara, dan temuan penelitian lainnya. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan, proses ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Kondensasi data merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menyempurnakan, menyaring, memusatkan, membuang, dan mengatur data hingga kesimpulan tercapai. Kondensasi data dapat dilakukan melalui pengembangan tema, menulis ringkasan, dan mengklasifikasikan data yang tidak relevan sampai selanjutnya dilakukan verifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*Display Data*) merupakan sekumpulan data yang terorganisir memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan dan Tindakan. Data atau informasi disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti menyusun ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk bagan, diagram, tabel, dan matriks. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

d. Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Tahap ketiga dalam analisis data adalah menggambarkan serta menarik kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*). Selama dalam proses penelitian, data atau informasi yang diperoleh dapat terus

diverifikasi sehingga peneliti dituntut untuk mencapai tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, makna yang akan diungkap berasal data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari sumber-sumber tersebut akan diperoleh kesimpulan awal yang masih belum jelas maknanya, dengan demikian diperlukan kegiatan verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan mengulang kembali kegiatan kondensasi dan penyajian data, agar peneliti mampu menarik kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian. Kesimpulan akhir tersebut bertujuan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian, dalam penelitian ini kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif sesuai hasil pengumpulan data lapangan.

